

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN BUS DI KABUPATEN SANGGAU

Oleh :

RIVALDO CAHYA RAHMAWAN^{1*}

NIM : E1011171066

Yulius Yohanes^{2*}, Bima Sujendra.^{2*}

Email : rivaldo20@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan penertiban angkutan bus pada Seksi Angkutan Jalan dan Terminal trayek Sanggau – Pontianak di Terminal Bus Sanggau Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan teori Hasibuan (2011,244) yang terdiri dari pengawasan langsung yaitu inspeksi langsung, 2) Pengamatan di lapangan, 3) Laporan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan pengawasan oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan bus di Kabupaten Sanggau. 1) Pengawasan dengan teknik inspeksi langsung belum optimal karena pengemudi angkutan bus tetap melanggar peraturan yang telah berlaku meskipun mengetahui mengenai peraturan tersebut. 2) Pengamatan di lapangan tidak optimal disebabkan Dinas Perhubungan memiliki kendala kekurangan personil yang dibutuhkan untuk kegiatan turun di lapangan. 3) Teknik laporan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan baik dibuktikan dengan pembuatan laporan dari pegawai pengawas, petugas terminal, kepala seksi dan kepala bidang. Saran terkait penelitian ini adalah Dinas Perhubungan diharapkan dapat menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa untuk tidak menunggu angkutan bus di tempat selain halte dan terminal. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk lebih tegas dan melakukan penindakan terhadap angkutan bus yang tidak memenuhi standar kelaikan jalan serta dapat lebih optimal melakukan pengawasan dalam penertiban angkutan bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat selain halte dan terminal.

Kata Kunci: Pengawasan, Penertiban, Angkutan Bus, Sumber Daya Manusia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan dan pengembangan Kota Sanggau adalah salah satunya terwujud melalui kegiatan yang adanya pemusatan dan penyebaran lokasi seperti pasar, perumahan, perkantoran, rumah sakit dan sekolah. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi memicu terjadinya arus urbanisasi sehingga secara tidak langsung menambah kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi. Aktifitas masyarakat perlu ditunjang dengan adanya sarana transportasi umum yang memadai. Sehingga memudahkan mobilitas masyarakat itu sendiri. Peningkatan transportasi perlu di perhatikan terutama bagi transportasi darat di wilayah perkotaan. Sistem pengangkutan atau transportasi perlu ditata dan secara terus menerus disempurnakan sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sanggau merupakan satu daerah yang terletak di tengah-tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka menunjang kegiatan perdagangan dan mobilitas masyarakat hilir dan mudik, maka memerlukan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan antar kota

sehingga transportasi dapat berfungsi dengan baik melayani aktifitas masyarakat. Agar transportasi dapat berjalan baik maka harus dilakukan koordinasi perencanaan serta pelaksanaan transportasi secara terpadu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Mobil bus adalah kendaraan bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang. Sebagai menunjang kegiatan perdagangan dan mobilitas masyarakat hilir dan mudik maka dibutuhkan sarana transportasi publik, termasuk Bus AKDP (Angkutan Kota Dalam Provinsi) dan ANGDES (Angkutan Desa). Kecamatan Kapuas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau yang memiliki terminal bus, jenis angkutan yang beroperasi di terminal Bus Sanggau Kecamatan Kapuas adalah Bus AKDP dan Bus Angdes.

Terdapat 13 unit angkutan Bus yang terbagi menjadi 7 unit Bus Angdes dan 6 Unit Bus AKDP. Sebanyak 5 Unit Bus AKDP dengan Rute Trayek Sanggau - Pontianak dan 1 Unit Bus AKDP dengan rute Sintang. Bus AKDP merupakan sarana transportasi penting, penunjang mobilitas masyarakat hilir dan mudik. Menghubungkan wilayah strategis

provinsi, sehingga masyarakat pengguna jasa bus AKDP cukup banyak dibandingkan bus Angdes.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 Seksi Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, faslitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang meliputi penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 daerah Kabupaten. Terdapat indikasi masalah bahwa angkutan bus sebagai salah satu angkutan umum melakukan pelanggaran ketertiban lalu lintas. Seksi lalulintas angkutan jalan dan terminal bertugas sebagai otoritas yang melakukan penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 daerah kabupaten.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 96 Ayat 3 bahwa Petugas Pengawasan atas Kepatuhan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah Petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Angkutan bus memiliki peran penting, tetapi di lain pihak keberadaan angkutan umum seperti bus sering kali mengundang bahaya dan melanggar ketertiban lalu lintas. Seperti menaik dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, di daerah pasar dan di persimpangan jalan, yang seharusnya angkutan bus menaik dan menurunkan penumpang di tempat seperti halte dan terminal.

Menurut PERDA Kabuapten Sanggau NO 15 TAHUN 2017 tentang ketertiban umum. Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa Setiap Pengemudi Kendaraan Angkutan umum dan Angkutan barang wajib, Menunggu, menaik dan/ atau menurunkan orang dan / atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain daripada itu pada pasal 6 Ayat 2 di sebutkan bahwa Pengemudi kendaraan umum dilarang, menaik dan menurunkan penumpang di luar tempat yang telah di tetapkan; dan/atau menaik dan menurunkan serta membawa penumpang di luar izin trayek yang telah di tetapkan. Semakin diperjelas dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2019, Pasal 38 ayat 1 dan 2. Bahwa, Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan. Tempat yang ditentukan adalah terminl, halte dan rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

Beberapa angkutan bus juga tidak memenuhi laik jalan sehingga dapat membahayakan pengguna transportasi bus dan juga pengguna jalan yang lainnya. Bus yang tidak laik jalan ini diantaranya dapat dilihat dari penggunaan kaca yang tidak standar, badan bus yang kebanyakan kropos, kaca lampu yang tidak asli, lampu sen yang mati atau wiper yang rusak serta tidak adanya sabuk pengaman bagi pengemudi. Selain dari kelaikan jalan Angkutan bus, tidak lengkapnya unsur administrasi pengemudi bus juga memerlukan perhatian, pemeriksaan terhadap unsur administrasi yang telah dilaksanakan terhadap 16 kendaran angkutan umum terlihat bahwa masih banyak angkutan umum yang tidak melengkapi unsur administrasi pada saat kendaraan beroperasi.

Kartu Pengawasan (KP) merupakan bukti pengawasan dari Dinas Perhubungan

atas kendaraan yang beroperasi. Kartu Pengawasan digunakan sebagai syarat beroperasinya kendaraan angkutan umum, wajib diperpanjang setiap setahun sekali. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa pengemudi yang Kartu Pengawasannya sudah tidak berlaku masih tetap beroperasi, atau dapat diartikan bahwa angkutan umum tersebut belum pernah diawasi sejak terakhir masa kartu pengawasannya berlaku.

Permasalahan yang disebabkan oleh angkutan umum seperti bus tersebut perlu menjadi perhatian. Karena, apabila angkutan bus tidak memenuhi aturan yang berlaku akan sangat berbahaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan Bus. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan sistem transportasi yang nyaman dan aman serta tidak merugikan masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah di kemukan diatas, maka identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempat yang ditetapkan.
2. Masih terdapat bus yang tidak memiliki

kelengkapan jalan sehingga tidak laik jalan.

3. Masih adanya pengemudi bus yang tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti tanda Uji Kelaikan/buku KIR yang telah mati dan KP yang tidak diperpanjang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan serta dengan melihat indentifikasi masalah serta melihat focus masalah, maka dari itu peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengawasan Seksi Angkutan Jalan dan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau dalam Penertiban Angkutan Bus (AKDP) Trayek Sanggau – Pontianak Di Terminal Bus Sanggau Kecamatan Kapuas ?

4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Pengawasan Penertiban Angkutan Bus (AKDP) Pada Seksi Angkutan Jalan dan Terminal Trayek Sanggau – Pontianak di Terminal Bus Sanggau Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau terkait pengawasan langsung, pengamatan di lapangan, laporan di lapangan.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yang di harapkan

dalam penelitian ini ialah dapat berguna bagi pengembangan konsep ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen transportasi, yang mengkaji tentang Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban Angkutan Bus. Manfaat praktis, bagi Dinas Perhubungan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penertiban angkutan umum khususnya Bus. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan dijadikan referensi bagi pengemudi untuk meningkatkan pelayanan dan mematuhi peraturan. serta menjadi referensi dan masukan bagi peneliti ;ain,khsususnya para peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang transportasi umum.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana – rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan – tujuan rapat terselenggara. Pengertian dari pengawasan diungkapkan oleh Manullang dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Manajemen” yang mengatakan bahwa “pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan

apa yang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula” (Manullang,2006:16).

Konsep pengawasan dalam pelaksanaannya ialah menetapkan tujuan, melakukan evaluasi dan melakukan perubahan dan tindakan-tindakan korektif apabila diperlukan agar sesuai dengan sasaran. Menurut G.R. Terry (dalam hasibuan 2011, 242) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan diatas maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses menerapkan pekerjaan yang sudah Lebih lanjut menurut Sujamto pengertian pengawasan ini berasal dari kata awas, yang berarti “mampu mengetahui secara cermat dan seksama”. Jadi tujuan pengawasan tidak lain hanyalah untuk mengetahui (secara cermat dan seksama) kenyataanya yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud agar pekerjaan berjalan sesuai rencana semula. Jika tanpa

ada pengawasan, maka setiap kegiatan yang ada akan sulit mengalami keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan melakukan pengawasan maka penyimpangan, kesalahan, atau masalah apapun yang terjadi dalam setiap kegiatan dapat diminimalisir serta diatasi secara maksimal, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

Menurut (Kartono 2016,81) Semua pekerjaan yang diberikan dari pimpinan kepada bawahannya agar terjamin dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka seorang pemimpin tersebut harus memiliki kemampuan dalam memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.

Pengawasan melekat merupakan kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahannya secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. Sedangkan indikator pengawasan yang akan

dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan ukuran pelaksanaan. Cara-cara mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
- b. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai ke setiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau buruk.
- c. Melakukan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu, memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono 2016,153).

Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung ada macamnya informasi yang diterima.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena

itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Rachman (dalam Situmorang dan Juhir 2001,22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat dikatakan bahwa maksud dari pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara berkaitan

dengan tujuan pengawasan, Malayu S.P Hasibuan (2011, 242) Mengemukakan:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan dengan sesuai ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan – kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan – kesalahan tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan – kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hasil akhir diketahui. Dengan pengendalian ini diharapkan semua unsur manajemen dapat terpenuhi (6M), efektif dan efisien.

3. Jenis – Jenis Pengawasan

Seorang pemimpin mempunyai berbagai cara dalam memastikan bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui sebuah proses kontrol atau pengawasan. Menurut Hasibuan (2011, 244) ada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung:

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung. Kebaikannya :
 - a. Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga perbaikannya dilakukan dengan cepat.
 - b. Akan terjadi kontak langsung antara bawahan dan atasan, sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dengan bawahannya.
 - c. Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan, karena merasa diperhatikan oleh atasannya.
 - d. Akan tertampung sumbangan pikiran dari bawahan yang mungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya.
 - e. Akan dapat menghindari timbulnya kesan laporan “asal bapak senang” (ABS).
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan bawahan. Laporan ini dapat berupa

lisan atau tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah icapai. Kebaikannya :

- a. Waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan, dan lainnya.
- b. Biaya pengawasan relati kecil.
- c. Memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam melaksanakan pekerjaan.

1. Pengawasan Langsung (*direct control*).

Cara ini digunakan untuk mengamati jalannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh petugas penyelenggara secara langsung.

Selain itu cara ini juga untuk melihat bagaimana petugas menyelesaikan tugasnya. Informasi yang diperoleh yaitu informasi *on the spot* (di lapangan) karena sesuai dengan kejadian yang terjadi. Adapun teknik yang digunakan secara langsung adalah sebagai berikut:

- a. *On the spot observation* (Pengamatan di lapangan).

Teknik ini merupakan pengamatan langsung dari manajemen untuk mengamati petugas operasional dalam menyelesaikan tugasnya. Penerapan teknik ini dapat menciptakan kesan bahwa

manager atas peduli dan tidak segan untuk turun lapangan.

- b. *On the spot report* (laporan di lapangan).

Teknik ini hampir sama dengan teknik *on the spot observation*. Hanya saja teknik ini menggunakan perantara laporan dalam pelaksanaannya. Laporan penyelenggara tersebut dibuat dan diserahkan langsung pada manajemen.

2. Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control*).

Merupakan pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan dari bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:

- a. Laporan tertulis.

Laporan tertulis adalah laporan yang dibuat oleh penyelia untuk atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian atasan akan mengukur sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan dengan perencanaan yang ditetapkan.

- b. Laporan lisan.

Proses penyampaian laporan secara lisan berlangsung secara berkala, laporan tersebut berisi perkembangan proses pencapaian tujuan baik dari segi negatif. Penyelia memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya sementara atasan dapat

bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukan.

Menurut Daly Erni (2008,23) jenis-jenis pengawasan :

1. Pengawasan intern dan ekstern

a. Pengawasan intern.

Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Pengawasan ekstern. Pengawasan yang dilakukan di luar badan/unit/instansi tersebut.

2. Pengawasan Preventive dan Refresif

a. Pengawasan Preventif : sebelum kegiatan dilaksanakan

b. Pengawasan Refresif : setelah kegiatan dilaksanakan

3. Pengawasan aktif dan pasif

a. Pengawasan aktif merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.

b. Pengawasan pasif melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

Untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan maka diperlukan proses pelaksanaan pengawasan untuk merealisasikan tujuan yang ditetapkan.

Adapun pengawasan yang baik itu terdiri atas beberapa proses yang harus dilalui. Yang dimaksud dengan proses pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam pengawasan.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2011,245) proses pengawasan dapat dilakukan dengan fase-fase berikut:

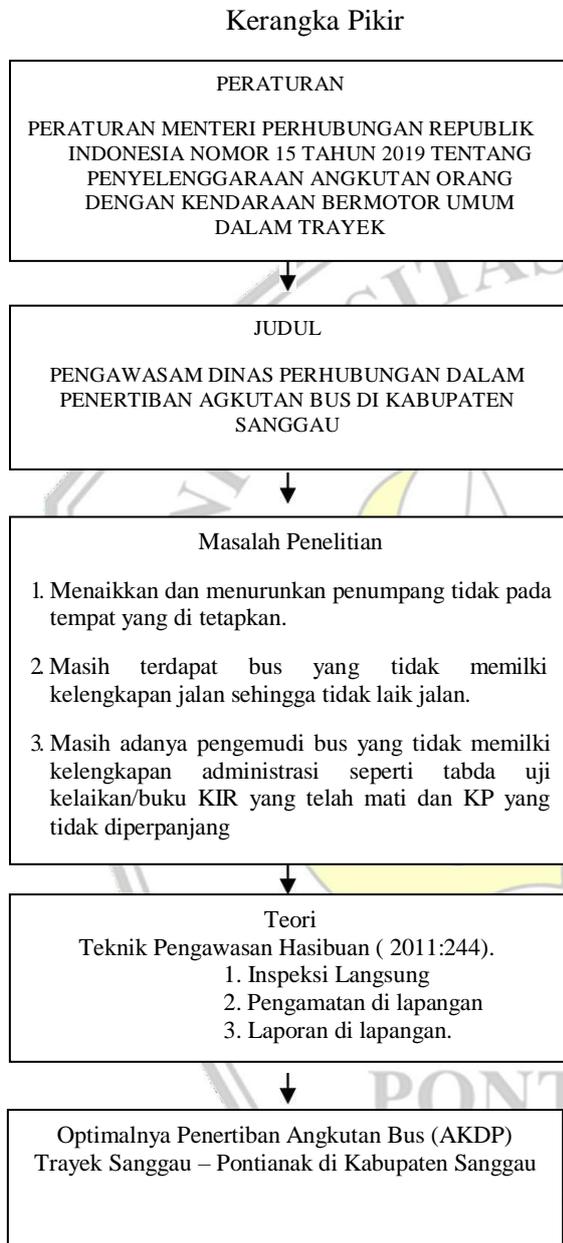
1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil yang dicapai.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Faktor yang Mempengaruhi pengawasan, berikut akan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut : menurut Mulyadi (2007:770), mengemukakan beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;

3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

4 Alur Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti, Maret 2021

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan didalam penelitian ini adalah jenis

deskriptif kualitatif, menurut sugiyono (2010:33) penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Penelitian kualitatif mempergunakan data yang dinyatakan secara verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis.

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pertimbangan agar bisa mendeskripsikan keadaan, gejala, dan masalah yang terjadi pada Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Bus di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Selanjutnya, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara objektif dan kompleks sesuai dengan kondisi di lapangan sesungguhnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, serta alat dokumentasi. Pada penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan bus di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara. Peneliti menjelaskan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Hasibuan sebagai pisau analisis penelitian. Teori yang dikemukakan oleh Hasibuan memiliki 3 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan bus di Kabupaten Sanggau. Teori yang dikemukakan adalah teori pengawasan langsung meliputi inspeksi langsung, Pengamatan di lapangan, laporan di lapangan. Sebagai berikut :

a. Inspeksi Langsung

Dalam pengawasan langsung melalui inspeksi langsung, seorang pemimpin melakukan pengawasan secara langsung dengan turun ke lapangan atau tempat kegiatan dilaksanakan. Dalam hal ini pemimpin suatu instansi seperti kepala dinas atau kepala bidang dan kepala seksi mendatangi dan melakukan pemeriksaan

secara seksama terhadap objek yang diawasi. Melalui cara inspeksi langsung, dapat dilihat atau bertujuan mengetahui petugas penyelenggara dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan melakukan inspeksi langsung maka terjadi kontak langsung antara atasan dan bawahan sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan, karena bawahan merasa diperhatikan. Inspeksi langsung yang dilakukan adalah pemeriksaan secara seksama untuk mengetahui kesiapan maupun proses kegiatan yang dilaksanakan apakah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengawasan terhadap angkutan umum baik itu angkutan barang ataupun angkutan orang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan.

Pengawasan terhadap angkutan bus masuk sebagai pengawasan rutin yang dilakukan oleh petugas, dalam hal ini adalah petugas terminal. Selain dari pengawasan rutin, Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan secara berkala. Pengawasan berkala yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pada saat perayaan keagamaan. Biasanya pengawasan berkala dilakukan sebelum perayaan agama yang dimaksud dimulai. Secara teknik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sangat berdampak positif pada masyarakat

khususnya pengguna jasa transportasi umum, karena secara langsung memberikan kesan bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap angkutan umum khususnya angkutan bus. Dinas Perhubungan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala sebagai upaya meminimalisir kegagalan teknis kendaraan yang mengangkut maupun *human eror*.

b. Pengamatan di Lapangan

Tehnik ini merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh manajemen dalam hal ini manajemen mengamati bagaimana petugas operasional di lapangan menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan kepadanya. Pengamatan dilapangan bisa dikatakan merupakan tehnik pengawasan yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung yang dilakukan oleh petugas pengawas dan dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Bus di Kabupaten Sanggau.

Petugas pengawas dari Dinas Perhubungan tidak hanya mengawasi angkutan bus yang ada di terminal melalui petugas terminal, tetapi melakukan pengawasan dari pagi hari melalui patroli lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) apabila menemukan suatu pelanggaran lalu lintas petugas pengawas dari dinas perhubungan hanya dapat menghimbau atau

menertibkan. Petugas pengawas dari Dinas Perhubungan dapat mengarahkan pentingnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menjaga kenyamanan serta keamanan lalu lintas. Bidang lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab terkait dengan penertiban angkutan umum baik barang maupun penumpang, serta inspeksi terhadap angkutan tersebut. Bidang lalu lintas dan angkutan jalan Dinas perhubungan juga memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin angkutan umum beroperasi.

Pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati jalannya kegiatan pengawasan, petugas yang melakukan pengawasan melakukan pengamatan secara langsung dengan patroli di jalan pada pagi hari. Petugas pengawasan merupakan pegawai dari Dinas Perhubungan yang biasanya berjumlah 12 orang untuk sekali melakukan pengawasan seperti penertiban lalu lintas dan angkutan melalui razia. Dalam melakukan kegiatan pengawasan apalagi yang berhubungan dengan lalu lintas tentu memerlukan ketersediaan personil yang cukup banyak agar kegiatan pengawasan berjalan lancar dan lalu lintas yang padat tidak terjadi penumpukan karena lamanya proses pemeriksaan. Dinas Perhubungan sudah berusaha

semaksimal mungkin dalam upaya penertiban angkutan bus. Mulai dari penertiban, razia dan juga inspeksi kendaraan yang dilakukan setiap tahun. Apabila angkutan bus terbukti melanggar ketertiban maka akan ada sanksi yang harus diterima oleh sopir angkutan tersebut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diatas dapat diketahui bahwa dalam rentang waktu pukul 07.00 wib hingga 12.00 wib. Terdapat angkutan bus yang melakukan pelanggaran ketertiban dengan menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat selain halte dan terminal meskipun sopir angkutan bus mengetahui tentang larangan tersebut. Dalam pengamatan yang dilakukan, tidak ditemukannya pihak petugas Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh sopir angkutan bus tidak mendapatkan sanksi seperti yang dinyatakan. Masalah yang masih terjadi tersebut tentunya menjadi dampak negatif dari sistem pengawasan yang telah dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau.

c. Laporan di Lapangan

Laporan di lapangan merupakan suatu bentuk pengawasan langsung melalui cara laporan di tempat, yaitu dari

petugas pengawas seperti petugas terminal ke pegawai pengawas. Pegawai pengawas meminta laporan atau berkas sehubungan dengan pengawasan angkutan bus pada saat berangkat atau menurunkan penumpang di terminal. Selain itu petugas pengawas juga memberikan laporan kepada atasan seperti bidang terkait setelah kegiatan pengawasan dilakukan atau sebelum kegiatan pengawasan dilakukan.

Laporan yang diberikan berisi kondisi atau kendala yang dihadapi selama di lapangan secara langsung. Teknik ini bertujuan melengkapi pengawasan langsung di lapangan dan dapat memperkuat maupun membuktikan hasil dari pengawasan langsung yang dilakukan. Petugas pengawas melakukan pengecekan mengenai kesiapan angkutan bus sebelum berangkat ke tujuan, petugas pengawas ini adalah petugas terminal. Selain dari kondisi secara fisik angkutan, petugas juga memeriksa kelengkapan jalan sopir angkutan. selain dari petugas terminal yang melakukan pengawasan, juga terdapat petugas pengawas dari pegawai Dinas Perhubungan yang melakukan patroli setiap pagi, selain itu pada saat – saat tertentu melakukan pengawasan seperti razia dan melakukan inspeksi keselamatan kendaraan angkutan umum berupa rampcheck setiap tahun atau di hari

besar perayaan keagamaan. Setiap kegiatan yang dilakukann oleh petugas pengawas dari Dinas Perhubungan selalu menyertakan laporan langsung di lapangan secara aktual. Data yang diterima secara aktual dilaporkan kepada pemimpin organisasi yaitu Kepala Dinas dan pemimpin bidang terakait pengawasan tersebut. Data yang diterima hanya bersifat umum dan sementara, sedangkan berkas laporan secara resmi dan lebih rinci sudah ada jadwal sesuai dengan aturan yang ada di organisasi.

Dalam menyampaikan laporan secara umum, para petugas tersebut memberikan laporan melalui Grup Whatsapp yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, grup whatsapp ini dibuat untuk internal Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau. Didalamnya dimuat laporan – laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Perhubungan secara aktual. Selain memberikan laporan secara tertulis di grup whatsapp tersebut, para pegawai juga memberikan laporan dalam bentuk dokumentasi berupa foto pada saat kegiatan dilaksanakan. Hal tersebut agar pesan atau laporan yang disampaikan keasliannya tidak di pertanyakan atau terbukti terjadi di lapangan. Selain laporan melalui grup whatsapp, para pegawai

Dinas Perhubungan yang melakukan kegiatan pengawasan biasanya melaporkan secara lisan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas. Laporan yang masuk setiap hari melalui grup ini nantinya akan di rekap dan akan di laporkan secara tertulis di dalam dokumen resmi, untuk di pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu dalam penyampain laporan pegawai tidak boleh asal – asalan dalam mengerjakannya, harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan laporan yang diberikan tersebut, juga sebagai bukti kepada atasan bahwa para pegawai Dinas Perhubungan telah menajalankan tugas pengawasannya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung dengan tehnik Inspeksi Langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam Penertiban Angkutan Bus di Kecamatan Kapuas sudah cukup baik, namun belum optimal. Pengawasan Dinas Perhubungan dianggap cukup baik terbukti dengan adanya kegitan pengawasan dengan jadwal pengawasan yang dibuat oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan tidak melakukan pengawasan secara optimal hal ini dikarenakan pengemudi angkutan bus juga

tetap melanggar aturan yang berlaku meskipun telah mengetahui aturan tentang menaikkan penumpang dan menurunkan penumpang di luar halte dan terminal.

2. Teknik Pengamatan Di Lapangan (*On The Spot Observation*). Dinas perhubungan melakukan pengawasan langsung dalam penertiban angkutan bus di Kecamatan Kapuas dengan melakukan teknik pengamatan di lapangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal. Dinas Perhubungan memiliki kendala yaitu kekurangan personil yang dibutuhkan untuk kegiatan turun di lapangan, idealnya dalam sekali kegiatan razia memerlukan sekitar 20 orang. Tetapi, jumlah yang pegawai yang melakukan pengawasan yang dapat dipenuhi oleh Dinas Perhubungan hanya berkisar 12 orang.

3. Teknik Laporan Di Lapangan (*On The Spot Report*). Teknik Laporan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau sudah dilakukan dengan baik, terbukti dengan pembuatan laporan dari Pegawai Pengawas, Petugas Terminal, Kepala seksi dan Kepala Bidang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini yang telah diuraikan diatas

peneliti dapat memberikan saran. Saran yang diberikan kiranya sedikit banyak dapat memberikan manfaat untuk pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan Pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan bus di Kabupaten Sanggau adalah.

1. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk lebih menegaskan dan menekankan kepada pegawai yang melakukan pengawasan untuk meningkatkan kinerjanya dan lebih tegas dalam melakukan pengawasan. Sehingga pengawasan yang dilakukan dapat menjadi optimal.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau diharapkan dapat menghimbau dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa untuk tidak menunggu angkutan bus di tempat selain halte dan terminal. Sehingga masyarakat memahami aturan dan tidak menunggu angkutan bus di tempat selain halte dan terminal.
3. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau untuk lebih tegas dan melakukan penindakan terhadap angkutan bus yang tidak memenuhi standar kelaikan jalan, sehingga tidak

ditemukan lagi angkutan bus tersebut yang masih beroperasi.

4. Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau diharapkan dapat lebih optimal melakukan pengawasan dalam penertiban angkutan bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat selain halte dan terminal.
5. Dinas perhubungan perlu menambah jumlah SDM dan menambahkan PPNS, sehingga kekurangan personil untuk melakukan kegiatan pengawasan tidak menjadi kendala.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UGM.
- Adisasmita, Raharjo. 2014, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap. Sofyan Syafri. 2003. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta. Pustaka Quantum.
- Hasibuan S.P., Malayu. 2011. *Manajemen Dasar Pengertian, dan masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu? Rajawali Pers*. Vol. 5.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Bandung: Remaja Roskadya*.
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Penerbit Agnini.
- Nasution. Nur, 2010. *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif , dan R&D*. Bandung. ALFABETA.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Situmorang & Juhir.2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung Pustaka Setia.
- Sugito, dkk. 2017. *“Panduan Penulisan Skripsi FISIP UNTAN”*. Pontianak. CV Alvabeta.
- Wijaya, Chandra dan Rifa’i Muhammad. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*, Medan: Perdana Publishing.

Sumber Perundangan-Undangan :

- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Daerah. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum*. Sekretariat Daerah. Sanggau

Pemerintah Daerah. 2021. *Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau No. 10 Tahun 2021 Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan*. Sekretariat Daerah. Sanggau

Admin. 2019. *Lalu Lintas Dan Angkutan*. www.dishub.sanggau.go.id. (diakses tanggal 25 maret).

Diskominfo Sanggau.2020. *Satu Data Kab. Sanggau*.Data.sanggau.go.id. (diakses 20 tanggal 20 maret).

Jurnal:

Dimas, Ida, hayu. 2017. *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor di Kota Semarang* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No.6

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/21106/19746> diakses 5 juli 2021, waktu 19:23.

Indrawati, Dewi. 2021. *Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Walikota Tentang Lajur Kiri Di jalan Ahmad Yani Pontianak* (Skripsi). Pontianak (ID): Universitas Tanjungpura.

Sari, Hardilla Fitri. 2014. *Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perubungan Dalam Penertiban Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru* (Skripsi). Pekanbaru (ID): Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ruswandi, Fyra. 2019. *Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pelaynan Jasa Trasnportasi Umum Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Pada Tahun 2017* (Skripsi). Jatinangor (ID): Universitas Padjadjaran Jatinangor.

Sumber Internet: